



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK DISTRIBUSI KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD JOHARIFIN
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 194491

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.380.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/54 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 3380 m²/300 m² di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 410.000.000

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.517.650

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.388.744

F. HARTA LAINNYA Rp. 1.133.000.000

Sub Total Rp. 3.041.906.394

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.041.906.394

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.